BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stewardship (Stewardship theory)

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, stewardship theory memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun shareholders pada khususnya. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya.

LKPD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan good governance. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan LKPD, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi berbagai kalangan pihak yang

membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals*sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan.Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas.Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran akuntansi sangat diperlukan.

Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (stewards/manajemen) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara principalsdengan stewards didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Stewardship theory merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.2 Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur undang-undang dengan memperhatikan kekhus344usan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangandaerah.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/ bupati/ walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.Dengan demikian pengaturan

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yangsah
- Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
 Umum dan Dana AlokasiKhusus;
- 3. Dan lain-lain pendapatan daerah yangsah.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan

keuangan, karena kadang kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya yang merupakan pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih. Selain itu penetapan kebijakan akuntansi terpilih dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi akuntansi di setiap satuan kerja.

2.3 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011) Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : a) Keandalan pelaporankeuangan. b) Efektifitas dan efisiensi operasi. c) Kepatuhan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku.

Menurut COSO (2013:3) menyebutkan bahwa sistem pengendalian inetrn adalah sebagai berikut :

"Internal control is a process, affected by entitity's board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operation, reporting and compliance."

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan sistem internal sebagai berikut : "Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan melalui efektifitas dan efisiensi operasi, pelaporan dan kepatuhan.

Sedangkan definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ialah sebagai berikut:

"Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah."

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163).

Menurut Arfianti (2011) Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan,mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Jika sistem pengendalian intern lemah maka akan banyak ditemukan kasus penggelapan akan asset daerah, dan itu akan merugikan Negara secara keseluruhan.

Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pengendalian internalakuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi.Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2) Pengendalianadministratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

SPIP merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Wilkinson *et al.*, (2000) menyebutkan subkomponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah

- Perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor
- 2. Pemisahan tugas;
- 3. Otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi;
- 4. Pemeriksaan independen atas kinerja; dan
- 5. Penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain: (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal.

2.3.1 Komponen-Komponen Pengendalian Internal

Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission COSO (Sawyer et al,2005). Pengendalian Internal satuan usaha terdiri atas komponen-komponen berikut:

- 1) Lingkunganpengendalian
- 2) Penaksiranrisiko
- 3) Informasi dankomunikasi
- 4) Aktivitaspengendalian
- 5) Pemantauan

Sedangkan dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat lima unsur dari pengendalian internal pemerintahan yaitu:

1) PengendalianLingkungan

Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

2) PenilaianResiko

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luarmaupun dari dalam.

3) KegiatanPengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan.Kegiatan pengendalian

harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4) Informasi danKomunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5) Pemantauan PengendalianInternal

Harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2013:163), tujuan sistem pengendalian internal adalah:

- 1. Menjaga kekayaanorganisasi
- 2. Mengecek ketelitian dan keandalan dataakuntansi
- 3. Mendorong efisiensi,dan
- 4. Mendorong dipatuhinya kebijakanmanajemen

2.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Rasdianto (2013:6) yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah :

"Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)."

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggaran, peralatan dan elemen dalam mewujudkan fungsi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Romney, et. a1 (2003); W. Wilkinson (2000) mendefinisikan sistem sebagai suatu kelompok yang terdiri atas komponen-komponen (fungsi, manusia, aktifitas,'dan lain-lain) yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi merupakan data yang sudah dimanifestasikan dalam bentuk tertentu, sehingga bagi yang memerlukannya merupakan sesuatu yang berguna, mempunyai atau diharapkan akan mempunyai nilai nyata sebagai sarana dalam proses pengolahan data menjadi informasi.

Bodnar (2010); Jeffrey L Whitten, (2004) Wilkonson (2000) menekankan fungsi sistem informasi dalam transformasi data menjadi informasi yang akan digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh organisasi, dengan mengetengahkan dimensi pelaksana, data, proses, dan teknologi informasi. Sistem informasi berfungsi untuk mendukung aktivitas-aktivitas yang dijalankan sistem bisnis (organisasi).

2.4.1 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

2.4.2 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sistem akuntansi keuangan daerah meliputi :

1. Sistem akuntansi PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

2. Sistem akuntansi SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

2.4.3 Tahapan Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi Prosedur

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan siklus itulah tim penyusun mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan Pihak-Pihak Terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur.

Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

3. Menentukan Dokumen Terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut.Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

4. Menentukan Jurnal Standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debet dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

5. Menuangkannya Dalam Langkah Teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang

melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

2.4.4 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, prosedur akuntansi sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup:

- a) Surat Tanda Bukti Pembayaran
- b) Surat Tanda Setoran (STS)
- c) Bukti Transfer
- d) Nota Kredit Bank

Bukti transaksi penerimaan kas dilengkapi dengan :

- a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
- b) Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
- c) Bukti Transaksi Penerimaan Kas Lainnya
- 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka 23 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur pengeluaran kas meliputi :

- 1) Sub Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas-Langsung
- 2) Sub ProsedurAkuntansiPengeluaran Kas-Uang
 Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
 Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi
 pengeluaran kas mencakup:
 - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - b) Nota Debet Bank
 - c) Bukti Transaksi Pengeluaran Kas Lainnya
 Bukti transaksi prosedur prosedur akuntansi pengeluaran kas
 dilengkapi dengan :
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM)
 - b) Surat Penyediaan Dana (SPD)

c) Kuitansi Pembayaran dan Bukti Tanda Terima Barang/Jasa

3. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan :

- a) Berita Acara Penerimaan Barang
- b) Surat Keputusan Penghapusan Barang
- c) Surat Keputusan Mutasi Barang
- d) Berita Acara Pemusnahan Barang
- e) Berita Acara Serah Terima Barang
- f) Berita Acara Penilaian
- g) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas mencakup :

- 1) Koreksi Kesalahan Pembukuan
- 2) Penyesuaian Terhadap Akun Tertentu Dalam Rangka

 Menyusun Laporan Keuangan Pada Akhir Tahun
- 3) Reklasifikasi Belanja Modal Menjadi Aset Tetap
- 4) Reklasifikasi Akibat Koreksi Yang Ditemukan Dikemudian Hari

Bukti transaksi prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial dilampiri dengan :

- a) Berita Acara Penerimaan Barang
- b) Surat Keputusan Penghapusan Barang
- c) Surat Keputusan Mutasi Barang
- d) Berita Acara Pemusnahan Barang
- e) Berita Acara Serah Terima Barang
- f) Berita Acara Penilaian
- g) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- h) Sistem Pencatatan

SistemPencatatan

Terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan single entry, double entry, dan triple entry.

a. Single Entry

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sistem pencatatan single entry dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik di level SKPD maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sistem ini hanya sebagai alat kontrol sistem akuntansi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

b. DoubleEntry

Sistem pencatatan *double entry* Sering juga disebut sebagai sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah *menjurnal*. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut:

AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN

Transaksi yang berakibat bertambahnya *aktiva* akan dicatat pada
sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan
dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk mencatat

belanja. Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya *utang*, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa ini dilakukan untuk *ekuitas dana*dan *pendapatan*.

c. TripleEntry

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

Komponen Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010 yaitu:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran
- 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(SAL)
- 3. Neraca
- 4. Laporan ArusKas
- 5. LaporanOperasional
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas
- 7. Catatan atas Laporan Keuangan

2.5 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.

2.5.1 LaporanKeuangan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Walter, Charles, C.william dan Themin (2011:2) "Laporan keuangan (financial statement) adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai yang dapat meliputi manajer, investor, kreditor dan agen regulator". Sedangkan Menurut James C, Van Horne & John M, Wachowicz, JR (2012:154), menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan".

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh

suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entintas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Deddi&Ayuningtyas: 2016)

Informasi dalam laporan keuangan relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut.Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Laporan Keuangan Pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.Hak publikatas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban public.Pertanggung jawaban public mensyaratkan organisasi public untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan (accountability&stewardship).Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBD.Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsurunsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/deficit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset,kewajiban,dan ekuitas ada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non lancar serta mengkasifikasikan kewajibanya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan.Neraca mencantumkan pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara
- b) Investasi jangka pendek
- c) Piutang pajak dan bukan pajak
- d) Persediaan
- e) Investasi jangka panjang
- f) Asset tetap
- g) Asset lainnya
- h) Kewajiban jangka pendek
- i) Ke<mark>wajiban</mark> jangka panjang
- i) Ekuitas
- 3) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yangekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO,beban-beban dan akun-akun.Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
- b) Beban dari kegiatan operasional

- c) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional
- d) Surplus/defisit LO
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- 5) Catata<mark>n atas La</mark>poran Keuangan

Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkanya dengan laporan keuangan entitas lainya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan,ekonomi makro pencapaian target undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainya.

Perkembangan dapat dilihat dari perubahan sistem penyusunan

laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, yang mengharuskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang sebelumnya terbiasadenganpencatatanberbasiskasharusmerubahkebiasaantersebut danwajibmenyajikan laporan keuangan berbasis akrual mulai tahun 2015. Informasi akuntansi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif agar memiliki sebuah nilai informasi yang bermanfaat dalam pengambilan sebuah keputusan dan dapat dipahami oleh pemakai, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik tersebut berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, jika tidak maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian kelemahan administrasi daerah, ketidakhematan,

ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. (Surastiani &Handayani :2015)

2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan

Muller, *et al.*(2016:52) yang dijabarkan dari IPSAS menyatakan bahwa:

"The Objective og general purpose financial statements is to provide information to meet the need of those users of financial statements who are not in a position to demand reporting adapted to their needs. The users of general purpose financial statements include taxpayers, members of parliaments, creditors, suppliers, the media and public sector employees."

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah ada;ah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- 2. Menyedikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- 3. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaranya.
- 4. Menyediakan informasi mengenai cara entitas,pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- 6. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruhpengeluaran.
- 7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periodepelaporan.
- 8. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman

2.5.3 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yangdikehendaki.

1) Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a) Manfa<mark>at umpan balik (*feedback value*).</mark>
 - Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Manfaat prediktif (*predictivevalue*).

 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu(timeliness).

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapatdicegah.

2) Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

a) Dapat diuji kebenarannya(verifiable)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

b) Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c) Penyajian secara wajar/ jujur (representationalfaithfulness)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap
menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwaperistiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data
tersebut.Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3) Dapatdibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapatdip<mark>ahami</mark>

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.5.4 Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Earl R Wibon. *et.,al.* (2016:355) pengguna utama laporan keuangan luar pemerintah terdiri dari :

- 1. Citizens
- 2. Legislative
- 3. Oversight bodies
- 4. Creditors

Menurut Perautan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah.Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

- 1) Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
- 2) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Public ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiscal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan.
- 3) Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas,dan solvabilitas.
- 4) Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah dan pelewengan keuangan Negara.
- 5) Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manjemen
- 6) kompensasi.

2.5.5 Kendala Penyajian Informasi Keuangan yang Berkualitas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 kendala dalam menyajikan informasi keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi keuangan yang brekualitas akibat keterbatasan atau karena alas an-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam menyajikan informasi keuangan pemerintah yaitu:

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencatumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunanya.Oleh Karen aitu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunanya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi

tujuan informasi misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normative yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.Kepentingan relative antar karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan professional.

2.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan lembaga-lembaga publik di Indonesia baik pusat maupun daerah sedang mengalami perkembangan dalam hal pelaporan keuangan, yang ditandai dengan semakin tingginya tuntutan akuntabilitas publik dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dasar dari pengambilan keputusan.Oleh karena itu informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi para pemakai.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuanganya kepada publik.Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik :

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dibandingkan
- 4) Dapat dipahami

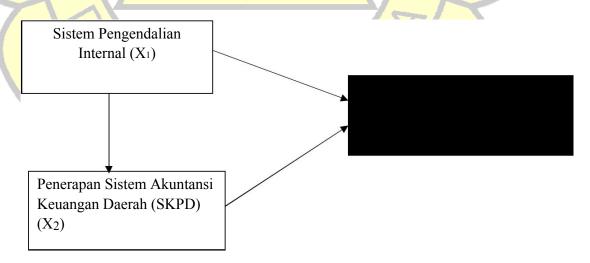
Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kualitasinformasi laporan keuangan adalah pengendalian internal.Pengendalian internal tersebut merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian internal yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.Semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah belakangan ini menunjukan indikasi bawa pengendalian internal belum berfungsi secara baik. Sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Tahap pengendalian seharusnya merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemahaman tentang peraturan dan penerapan sistem akuntansi tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan

pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan atau asset yang lebih transparan dan akuntabel.Perubahan peraturan tentang akuntansi pemerintah dari berbasis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sistem pengendalian internal, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD).Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka penelitian ini digambarkan pada model berikut ini

Gamba<mark>r 2.6</mark> Kerangka Berpikir



2.7 Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sistem Pengendalian Intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas kepercayaan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan".

Sistem pengendalian internal mempunyai peran penting dalam mencegah penyimpangan. Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang <mark>dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini "tidak wajar dan</mark>/atau disclaimer" diantaranya disebabkan oleh kelemahan pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2016).

Reni Yendrawati (2016) dalam penelitianya menguji hubungan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan daerah dan hasilnya menemukan hubungan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka perumusan hipotesisnya adalah :

Ha: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2.7.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Emilda Ihsanti (2014) dalam penelitianya berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka perumusan hipotesisnya adalah :

H₀: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.8
Penelitian Terdahulu

NO	Name Indel des Talem Baraliti	Wariahal	Hasil Penelitian
NO	Nama, Judul dan Tahun Peneliti	Variabel	
1	Bosa Edward	Variabel Independen:	Sistem Pengendalian Internal
	Internal Controls and the quality	1) Internal Control	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
	of financial statements in local	System	laporan keuangan daerah
	government	System	laporan kedangan daeran
		Variabel Dependen:	
	(2011)	Quality of financial	
		statements in local	101
		government	
		mi (U) E	
2	Ni Made Rika Krisna	Variabel Independen:	Pemahaman sistem akuntansi
	P + P - G:/		keuangan daerah dan
	Pengaruh Pemahaman Sistem	1) Pengaruh	peng <mark>elolaan</mark> keuangan daerah
	Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan	Pemahaman <mark>Sistem</mark> Akuntansi Keuangan	berp <mark>engaruh positif dan</mark> sign <mark>ifikan terhadap kua</mark> litas
	Daerah terhadap Kualitas	Daerah	lap <mark>oran keuangan da</mark> erah.
	Laporan Keuangan Daerah	2) Pengelolaan	
	(2014)	Keuangan Daerah	\bigcirc
	17/1/2	Variabel Dependen:	
	N/V/A	Kualitas Laporan	
		Keuangan Daerah	
3	Jessy Dimarcus L. Warongan,	Variabel Independen:	Kompetensi Sumber Daya
	Gagaring Pagalung, Paulus		Manusia dan Efektivitas
	Uppun, and Abdul Hamid	1) The Effects of Effectiveness	Sistem Pengendalian Internal
	Habbe	Internal Control	berpengaruh signifikan
	The Effects of Effectiveness	2) Human	terhadap kualitas laporan
	Mediation of Internal Control	Resources	keuangan daerah
	System on Competency of		
	Human Resources and Audit		
	Opinion in Previous Year		
	toward Quality of Financial		

	Statement	Variabel Dependen:	
	(2014)		
		Quality of Financial Statement	
4	Shakirat Adepeju Babatunde & Kabiru Isa Dandago Internal Control System Deficiency and Capital Project Mismanagement in the Nigerian Public Sector (2014)	Variabel Independen: 1) Internal Control System Variabel Dependen: Mismanagement sector public	Sistem Internal Control memiliki Efek Negatif yang signifikan pada manajemen Proyek Modal Di sektor Publik
5	Scovia Murungi & Callist Kayigamba The Impact of Computerized Accounting System on Financial Reporting in the Ministry of Local Government of Rwanda (2015)	Variabel Independen: The Impact of Computerized accounting system Variabel Dependen: Financial reporting in the ministry of Local Government	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif signifikan dalam hal kompleksitas keuangan pada manajemen proyek modal di sektor public
6	A.Dahri Adi Patra,LantengBustami,Hasriani Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (2015)	Variabel Independen: 1) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

7	Peny Cahaya Azwari & Nunuy	Variabel Independen:	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif pada
	Nur Afiah	1) The Effect of the Implementation	kualitas laporan keuangan
	The Effect of the implementation	Internal Control	daerah dan memberikan
	of government internal control	2) The primciples of good	dampak yang lebih baik dan signifikan positif terhadap
	system on the quality of financial reporting of the local	governance	tata kelola pemerintah yang
	government and its impact on the principles of good	Variabel Dependen:	baik.
	governance	Quality of financial	
	(2015)	reporting of the local	
	(2013)	government	
8	Dwi Susanto & Djuminah	Variabel Independen:	Penerapan sistem akuntansi
		1) Application of financial	keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
	The Usefulness of Local	accounting	keuangan pemerintah
	Government Financial Statements for Regional	system	
	Development Planning Process		
	(2015)	Variabel De <mark>penden</mark> :	*
		Quality of fi <mark>nancial</mark> Reporting of the local	
		government	
9	The Role of Internal Control in Enhancing Corporate	Variabel Independen:	Pe <mark>ngendalian inte</mark> rnal memiliki peran signifikan
	Governance Evidence	1) Internal Control System	dalam meningkatkan pilar
		Corporate Governance	tata kelola perusahaan yang baik
	VIVA	Variabel Dependen:	
	/ / ·	Quality of financial	
		reporting of the local	
		government	
10	Iskandar Muda,Deni	Variabel Independen:	Sistem pengendalian internal berpengaruh
	YuwilliaWardani Erlina, Azhar	•	terhadap kualitas laporan
	Maksum, Ade Fatma Lubis, Rina Bukit& Erwin Abu Bakar	1) The Influence of human resources	keuangan daerah.
	The Influence of human	competency and	
	resources competency and the	2) the use of	
	use of information techonolgy	information	

		1 1 01 1	, ,	
		on the quality of local	techonolgy	
		government financial report		
		with regional accounting system	Variabel Dependen:	
		as an intervening (2017)		
		0 ()	the quality of local	
			government financial	
			report with regional	
			accounting system as	
			Ů,	
			an intervening	
			HS	
	11	Dr. Muslim A. Djalil,	Variabel Independen:	Penerapan standar akuntansi
		Dr. Wushin A. Djani,	variabei independen.	pemerintah berpengaruh
Ы		Influence of Implemention of	1)Influence of	signifikan terhadap kualitas
		Influence of Implemention of	Implemention of	laporan keuangan pemerintah
		Government Accounting	Government	daerah, efektivitas sistem
			3 4 4	daeran, elektivitas sistem
		Standard and the Effectiveness	Accounting Standard	pengendalian intern
		of Government's Internal	2) the Effe <mark>ctiveness of</mark>	pemerintah berpengaruh
		ControlSystem on the Quality of	Governmen <mark>t's Internal</mark>	sign <mark>ifikan terhadap kua</mark> litas
		Lead Eigenstell Donat and Live	G TC	lapo <mark>ran keuangan pem</mark> erintah
		Local Financial Report <mark>and Its</mark>	ControlSys <mark>tem</mark>	daerah
		Impact Toward the	8/8	
		Accountability of Regional	Variabel Dependen:	
		Financial Management.	The Quality of Local	
		(2017)	Financial Report and	
			Its Impact Toward the	~/~
		ZMA	Accountability of	
		N/V/A	Regional Financial	
			Management	
			T. Zerreng Ciriciti	
			A .	